

# Konstruksi identitas politik gen z dalam ruang publik modern: studi kualitatif mengenai makna diskusi demokrasi di kafe modern

Muhammad Daffa Dinejad<sup>1</sup>

Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
e-mail: [alphaphoundation@gmail.com](mailto:alphaphoundation@gmail.com)

## Kata Kunci:

kafe modern, ruang publik hibrida, the third place, identitas politik, Gen Z, demokrasi deliberatif, Kota Malang

## Keywords:

modern cafes, hybrid public spaces, the third place, political identity, Gen Z, deliberative democracy, the city of Malang

## ABSTRAK

Kafe modern di Kota Malang telah bertransformasi menjadi ruang publik hibrida bagi Generasi Z) untuk bertukar ide tentang isu-isu demokrasi. Penelitian ini, menggunakan pendekatan fenomenologi, mengungkap lima temuan utama: (1) Kafe berfungsi sebagai "third place" modifikasi, menetralkan hierarki kelas meski tetap ada hierarki privasi; (2) Menggabungkan interaksi fisik dan digital, tetapi mengalami paradoks validasi digital yang dapat mengurangi kepercayaan diri individu; (3) Pergeseran dari popular public sphere menuju issue-partisan public sphere; (4) Estetika kafe menciptakan legitimasi untuk diskursus politik; (5) Kafe menjadi infrastruktur identitas politik Gen Z. Penelitian menyimpulkan bahwa kafe modern memfasilitasi partisipasi politik hibrid, reflektif, dan otonom, serta merekonseptualisasi beberapa teori ruang publik dalam konteks Gen Z digital native di Indonesia.

## ABSTRACT

Modern cafes in Malang have transformed into hybrid public spaces where Generation Z (Gen Z) can exchange ideas on democratic issues. This study, using a phenomenological approach, reveals five main findings: (1) Cafés function as a modified “third place,” neutralizing class hierarchies while maintaining privacy hierarchies; (2) They combine physical and digital interactions but face a digital validation paradox that can undermine individual self-confidence; (3) A shift from a popular public sphere toward an issue-partisan public sphere; (4) The café’s aesthetic creates legitimacy for political discourse; (5) Cafés become the infrastructure of Gen Z’s political identity. The study concludes that modern cafés facilitate hybrid, reflective, and autonomous political participation, and reconceptualize several theories of the public sphere within the context of digital-native Gen Z in Indonesia.

## PENDAHULUAN

Budaya minum kopi di Indonesia telah lama bertransformasi dari sekadar aktivitas konsumsi komoditas menjadi sebuah fenomena sosial dan budaya yang kompleks. Secara historis, kedai atau “warkop” berfungsi sebagai tempat sosial-budaya di mana berbagai masyarakat dari berbagai lapisan bertemu dan berinteraksi (Hakim & Amir, 2022; Suciati & Nuqul, 2025). Dalam konteks sosiologis, warkop berperan sebagai “ruang ketiga” atau *the third place* yakni sebuah ruang publik informal di luar rumah (ruang pertama) dan tempat kerja atau sekolah (ruang kedua), yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi secara setara dan terbuka (Faisal & Hasyim, 2022).



Namun, seiring dengan adanya modernisasi dan juga pergeseran ke arah gaya hidup urban, peran ruang publik seperti warkop ini mengalami evolusi yang signifikan. Kedai kopi tradisional yang bersifat komunal kini banyak digantikan oleh kafe modern dengan desain interior minimalis. Fasilitas Wi-Fi berkecepatan tinggi, dan penekanan pada aspek estetika atau *instagrammability*. Perubahan fisik ini memicu perdebatan di kalangan akademisi mengenai kualitas interaksi sosial di dalamnya. Beberapa peneliti berpendapat bahwa kehadiran kafe modern justru melemahkan keterlibatan sosial karena sifatnya yang cenderung individualis, di mana setiap pengunjung sibuk dengan gawainya masing-masing sehingga dimensi sosial sebagai mediator interaksi warga menjadi hilang (Viartasiwi & Trihartono, 2020). Dalam pandangan ini, kafe hanya dianggap sebagai simbol gaya hidup modern dan entitas ekonomi belaka, bukan lagi tempat penyemaian diskusi politik.

Meskipun Viartasiwi & Trihartono (2020) mengidentifikasi adanya pelemahan keterlibatan sosial akibat pergeseran ke arah kafe modern yang individualis, pandangan tersebut menyisakan celah teoretis terkait bagaimana interaksi digital tetap berlangsung di balik layar gawai pengunjung. Di sinilah penerapan konsep *Hybrid Public Sphere* (HPS) dari Middleton & Win (2021) menjadi krusial untuk membuka perspektif baru; bahwa ruang publik modern tidak serta-merta kehilangan dimensi politisnya, melainkan mengalami rekonfigurasi bentuk. Berdasarkan pemikiran Middleton & Win (2021), ruang publik hibrida didefinisikan sebagai ruang yang muncul dari ketegangan dan integrasi antara berbagai elemen ruang publik baik yang bersifat fisik-tradisional maupun digital-modern. Middleton & Win (2021) juga menekankan bahwa dalam ruang publik hibrida, batas-batas antara partisipasi formal dan informal menjadi terlebur atau “abu-abu” disebabkan aliran informasi yang terus-menerus melalui berbagai saluran komunikasi. Bagi Gen Z di kafe modern, “hibriditas” ini terwujud ketika mereka duduk secara fisik di sebuah meja, namun pada saat yang sama terlibat dalam diskursus demokrasi secara aktif di dalam internet atau dunia nyata.

Transformasi ini mengubah kafe dari sekedar tempat singgah menjadi apa yang disebut oleh Samnuzulsari et al. (2019) dan Luky et al. (2022) sebagai “ruang publik partisan”. Namun, dengan menambahkan perspektif hibriditas, kita dapat melihat bahwa aktivitas digital di kafe modern bukan sekedar distraksi, melainkan perluasan dari ruang publik itu sendiri. Ketersediaan infrastruktur teknologi di kafe menjadi instrumen penting yang memungkinkan individu untuk diskusi atau bahkan “negosiasi” terhadap isu-isu politik yang sedang hangat. Seperti yang dijelaskan oleh Farnanda et al. (2018), teknologi di kedai kopi berperan sebagai katalis partisipasi. Dalam konteks hibrida, aktivitas *scroll* sosial media atau berbagi konten (seperti aktivitas yang *instagrammable*) bukan lagi sekedar narsisme, melainkan cara Gen Z menandai kehadiran mereka dalam diskusi politik modern. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah yang ditinggalkan oleh penelitian sebelumnya dengan membuktikan bahwa kafe modern tidak mematikan diskusi politik demokrasi, melainkan kafe modern memfasilitasi lahirnya bentuk baru partisipasi politik yang hibrida dimana estetika tempat dan aksesibilitas digital menjadi fondasi utama bagi Gen Z dalam mengonstruksi identitas politik mereka. Melalui studi kualitatif ini, peneliti

ingin mengeksplorasi bagaimana integrasi antara ruang fisik dan digital di kafe modern menciptakan ekosistem demokrasi informal yang unik bagi generasi muda Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini berfokus pada bagaimana Generasi Z memanfaatkan kafe modern sebagai ruang publik untuk melakukan pertukaran ide dan opini mengenai isu-isu politik serta demokrasi di Indonesia. Penelitian ini berupaya melihat peran kafe modern tidak hanya sebagai tempat berkumpul atau konsumsi gaya hidup, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial yang memungkinkan terjadinya diskusi, penyampaian aspirasi, serta pembentukan kesadaran politik di kalangan generasi muda. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Generasi Z memanfaatkan kafe modern sebagai ruang publik dalam melakukan pertukaran ide dan opini mengenai isu-isu politik dan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan memahami bentuk interaksi sosial dan komunikasi politik yang muncul dalam ruang publik modern yang bersifat hibrida, baik secara langsung maupun melalui integrasi dengan media digital (Ridwan, 2018).

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur mengenai ruang publik hibrida, khususnya dalam konteks sosiologi perkotaan di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai bagaimana integrasi ruang fisik dan digital membentuk pola komunikasi politik baru yang tidak lagi dibatasi oleh ruang tradisional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperbarui pemahaman mengenai konsep “ruang ketiga” di era digital. Jika sebelumnya ruang ketiga dianggap mengalami pelemahan akibat penggunaan gawai, penelitian ini menawarkan perspektif bahwa teknologi justru merekonfigurasi ruang tersebut menjadi ekosistem demokrasi yang lebih luas. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji perilaku politik Generasi Z, transformasi budaya kopi, serta hubungan antara estetika ruang atau *instagrammability* dengan konstruksi identitas politik di media sosial.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada Generasi Z bahwa aktivitas keseharian mereka di kafe modern memiliki dimensi politis dan dapat menjadi bagian dari partisipasi demokrasi. Penelitian ini juga diharapkan mampu mendorong generasi muda untuk lebih kritis dan optimal dalam memanfaatkan ruang hibrida sebagai sarana diskusi dan partisipasi politik yang sehat. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan kepada pelaku usaha kafe bahwa kafe tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis atau ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi sosio-politik sebagai katalisator diskusi publik. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam merancang fasilitas yang mendukung interaksi sosial dan digital pengunjung. Penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai kanal aspirasi informal yang digunakan generasi muda saat ini, sehingga dapat membantu pemerintah maupun lembaga terkait dalam memahami cara menjangkau dan berdialog dengan Generasi Z melalui ruang publik yang relevan dengan gaya hidup

mereka. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat mengubah stigma negatif mengenai kafe modern sebagai tempat yang individualistis atau sekedar sarana pameran estetika, dengan menunjukkan bahwa terdapat aktivitas pertukaran ide, edukasi, dan diskusi politik yang berlangsung secara hibrida di dalamnya.

## PEMBAHASAN

Bagian ini menganalisis temuan lapangan secara kritis dan mensintesiskannya dengan kerangka teoretis yang telah dibangun. Pembahasan disusun dalam empat sub-argumen yang merespons empat dimensi teoritis utama penelitian ini.

### Rekonseptualisasi *The Third Place*: Hierarki, Privasi dan *Social Surveillance*

Konsep *the third place* Oldenburg (sebagaimana dikutip dalam Faisal & Hasyim, 2022) memandang kafe sebagai ruang netral yang menetralkan hierarki kelas dan membebaskan individu dari tekanan formal. Temuan penelitian ini secara parsial mengonfirmasi premis tersebut melalui *framing* "sama-sama pelanggan" yang dilontarkan informan, sebuah operasionalisasi langsung dari fungsi *social leveler* yang mengidentifikasi atribut sosial eksternal pengunjung (jabatan, latar belakang ekonomi) dengan identitas transaksional yang setara. Konfirmasi parsial ini menunjukkan bahwa konsep *the third place* tidak kehilangan relevansinya dalam konteks urban Indonesia kontemporer, meskipun beroperasi melalui mekanisme yang berbeda dari gambaran komunalitas tatap muka dalam konsepsi asli Oldenburg.

Namun, temuan ini juga mengungkap dua modifikasi teoritis yang signifikan. Pertama, kafe modern tidak homogen secara normatif, ia memiliki gradasi internal yang penelitian ini konseptualisasikan sebagai internal privacy zoning, di mana derajat kebebasan berekspresi berkorelasi positif dengan tingkat perlindungan spasial dari pandangan publik. Semakin terlindungi suatu zona (booth tertutup versus area terbuka), semakin tinggi keberanian informan untuk berpendapat. Kedua, fenomena *social surveillance*, dibuktikan oleh insiden konfrontasi fisik yang dialami rekan informan setelah mengkritik pihak tertentu secara lantang, mengungkap sebuah paradoks struktural: kafe mungkin netral terhadap hierarki kelas, namun tidak netral terhadap hierarki kekuatan informal. Kesadaran akan potensi pengawasan ini menciptakan mekanisme *self-censorship* yang membatasi domain wacana, sebuah dinamika yang beresonansi dengan konsep panoptisisme Foucauldian dalam konteks yang lebih informal (Foucault, 1995). Dengan demikian, *the third place* kontemporer perlu dikonseptualisasikan ulang sebagai ruang yang mengandung tegangan produktif antara inklusi sosial berbasis identitas konsumen, hierarki privasi berbasis arsitektur spasial, dan ancaman *surveillance* informal berbasis kekuasaan lokal.

### Ambiguitas *Hybrid Public Sphere* dan Efek Paradoks Validasi Digital

Teori *Hybrid Public Sphere* (Middleton & Win, 2021) membangun premis optimistis bahwa integrasi teknologi digital ke dalam ruang fisik memperluas kapasitas deliberatif

publik. Temuan penelitian ini mengonfirmasi berlakunya hibriditas tersebut, gawai dan konten viral di platform digital terbukti berfungsi sebagai *agenda-setter* yang efektif, membawa isu dari ekosistem algoritmik masing-masing individu ke dalam percakapan tatap muka di meja kafe, selaras dengan pandangan Bennett & Pfetsch (2018) mengenai aliran informasi horizontal dalam sistem media hibrida.

Akan tetapi, penelitian ini mengidentifikasi dimensi ambiguitas yang absen dari literatur yang ada: efek paradoks validasi digital. Ketika informan membuka gawai untuk mencari data sebagai basis argumen, ia justru menemukan bahwa realitas empiris lebih kompleks dari intuisinya, menghasilkan bukan penguatan argumen, melainkan kebimbangan epistemis. Mekanisme ini memiliki kesamaan konseptual dengan *information overload* (Eppler & Mengis, 2004), namun beroperasi secara lebih spesifik: bukan kelebihan informasi yang membingungkan, melainkan ancaman falsifikasi instan yang membuat individu enggan mempercayai intuisi argumentatifnya sendiri. Dalam kerangka deliberasi Habermasian yang mensyaratkan *rational argumentation* yang bebas (sebagaimana dikutip dalam Azizah, 2023), efek ini berpotensi menghasilkan "kemacetan deliberatif", di mana kontributor potensial memilih diam karena takut terbukti salah secara instan. Temuan ini mendorong rekonseptualisasi Hybrid Public Sphere sebagai arena ambiguitas teknologis, di mana kualitas partisipasi tidak berkorelasi linear dengan intensitas penggunaan teknologi, melainkan bergantung pada literasi hibriditas, kemampuan mengelola kapan harus memanfaatkan dan kapan harus melepaskan ketergantungan pada validasi digital.

### **Pergeseran dari Popular menuju *Issue-Partisan Public Sphere***

Samnuzulsari et al. (2019) mengidentifikasi tipologi ruang publik kedai kopi dalam kontinum dari *popular public sphere* (pertukaran informasi umum yang bebas) menuju *partisan public sphere* (ruang yang berorientasi pada kepentingan politik spesifik). Temuan penelitian ini menyajikan tiga evidensi pergeseran tipologis tersebut pada kafe modern di Kota Malang. Pertama, spesifisitas topik diskusi yang tinggi, mencakup mekanisme operasional SPPG dalam program MBG hingga angka kurs dolar yang spesifik, mengindikasikan bahwa diskusi kafe tidak lagi bersifat "populer" dalam pengertian pertukaran informasi umum yang longgar. Kedua, pemanfaatan kafe sebagai ruang deliberasi terorganisir oleh kalangan aktivis mahasiswa (kastrat BEM) menunjukkan bahwa kafe telah dipilih secara strategis oleh kelompok-kelompok dengan agenda advokasi tertentu. Ketiga, konseptualisasi informan mengenai kafe sebagai "parlemen mini" yang berpotensi mengagregasi aspirasi lokal menjadi tekanan kolektif mencerminkan kesadaran yang semakin tinggi mengenai dimensi politik dari aktivitas berkafe.

Namun, pergeseran ini tidak berlangsung sesuai pola konvensional Samnuzulsari et al. (2019) yang berbasis afiliasi kelompok. Di kalangan Gen Z urban, partisanisme mengambil bentuk yang berbeda: komitmen terhadap posisi isu (*issue-based partisanship*) tanpa afiliasi institusional, sebuah tipologi baru yang penelitian ini usulkan sebagai *issue-partisan public sphere*. Informan partisan dalam isu kelemahan kebijakan dan pentingnya literasi politik, namun menolak afiliasi partai atau organisasi

formal. Fragmentasi ini dipercepat oleh mekanisme algoritmik media sosial yang membentuk *bubble* informasi berbeda untuk setiap pengguna, sehingga ketika dua individu bertemu di meja kafe dan mendiskusikan isu yang sama, mereka membawa serta dua versi realitas yang terbingkai secara algoritmik berbeda (Bennett & Pfetsch, 2018).

### **Komodifikasi Estetika Kafe dan Konstruksi Kesadaran Politik Performatif Gen Z**

Awad (2021) mengonseptualisasikan estetika ruang urban sebagai media dialog di mana citra visual menjadi pusat negosiasi diskursus politik. Temuan penelitian ini mengonfirmasi dan memperluas perspektif ini dengan mengidentifikasi mekanisme efek legitimasi spasial: keberadaan di dalam kafe yang memiliki estetika modern-akomodatif memberikan rasa bahwa topik yang dibahas menjadi lebih "*official*" dan terbuka, berbeda dari norma akademis perpustakaan yang membawa beban hierarkis lebih kaku. Metafora yang digunakan informan, "membahas dosa-dosa besar Soekarno di makamnya", secara presisi mengilustrasikan bagaimana konteks spasial secara aktif menentukan repertoar tematik yang dapat diakses dalam sebuah sesi diskusi. Estetika kafe modern dalam kerangka ini bukan sekadar daya tarik visual sebagaimana dalam konsep *instagrammability* ÖNÜR MEN & TEMEL (2022), melainkan berfungsi sebagai prasyarat psikologis yang menurunkan hambatan berekspresi secara substantif.

Praktik digital presence Gen Z di ruang kafe, dokumentasi foto dengan motivasi "biar bilang lagi ada di situ", juga tidak dapat direduksi sebagai narsisme belaka. Tindakan tersebut merupakan pernyataan *social presence* yang mengomunikasikan lapisan-lapisan makna identitas secara simultan: selera estetis, gaya hidup urban-modern, dan orientasi sosial-politik. Junaidi et al. (2022) menyebut mekanisme ini sebagai produksi budaya (*cultural production*). Temuan ini mendorong penelitian mengusulkan konsep kesadaran politik performatif (*performative political consciousness*), bentuk keterlibatan di mana batas antara proses deliberatif internal dan ekspresi identitas eksternal menjadi cair dan saling membentuk. Performativitas mendorong keterlibatan substantif agar tidak kosong; keterlibatan substantif memberikan bahan bagi performativitas yang lebih autentik. Siklus dialektis ini, meskipun termediasi oleh logika estetika yang terkomodifikasi, menghasilkan kesadaran politik yang bernilai deliberatif nyata, sebagaimana ditunjukkan oleh kedalaman pengetahuan informan mengenai isu-isu kebijakan spesifik. Proses ini sejalan dengan konsep *re-storying* Landau-Donnelly & Zebracki (2023), yakni upaya menceritakan kembali posisi diri dalam struktur sosial-politik melalui ekspresi di ruang publik, yang dalam konteks kafe terjadi secara simultan lewat percakapan verbal dan representasi digital.

Menarik benang merah dari keempat sub-argumen di atas, penelitian ini berargumen bahwa kafe modern di Kota Malang telah bertransformasi menjadi infrastruktur identitas politik bagi Gen Z, menyediakan empat komponen saling melengkapi: (1) komponen spasial berupa *internal privacy zoning*; (2) komponen teknologis berupa afordansi digital dengan efek paradoks yang telah diidentifikasi; (3) komponen estetis berupa legitimasi spasial yang menurunkan hambatan psikologis

diskursus; dan (4) komponen sosial berupa ekosistem relasional berbasis kepercayaan. Keempat komponen ini bekerja sinergis membuktikan argumen sentral penelitian: kafe modern tidak mematikan diskusi politik demokrasi, melainkan memfasilitasi lahirnya bentuk baru partisipasi politik yang hibrid, reflektif, dan otonom.

## Kesimpulan dan saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kafe modern di Kota Malang berfungsi sebagai *the third place* yang termodifikasi, menetralkan hierarki kelas melalui identitas universal pelanggan, namun mengandung hierarki privasi internal dan rentan terhadap *social surveillance informal* yang bersifat laten. Sebagai ruang publik hibrida, kafe memadukan interaksi fisik dan digital secara simultan, namun ketersediaan gawai diwarnai oleh efek paradoks validasi digital yang berpotensi melemahkan kepercayaan diri berargumentasi spontan. Secara tipologis, kafe modern sedang bergeser dari *popular public sphere* menuju *issue-partisan public sphere*, sebuah bentuk baru partisanisme berbasis komitmen isu, bukan afiliasi kelompok, yang dipercepat oleh fragmentasi algoritmik media sosial. Estetika kafe bekerja sebagai prasyarat psikologis (efek legitimasi spasial), sementara praktik *digital presence* Gen Z merupakan bentuk *re-storying* identitas sosial-politik yang menghasilkan kesadaran politik performatif, sintesis dialektis antara performativitas dan substansi deliberatif. Secara keseluruhan, kafe modern telah bertransformasi menjadi infrastruktur identitas politik yang menyediakan komponen spasial, teknologis, estetis, dan sosial bagi konstruksi identitas politik Gen Z yang khas, reflektif, dan otonom. Penelitian ini memberikan tiga kontribusi teoritis baru: konsep *internal privacy zoning* sebagai modifikasi *the third place*, efek paradoks validasi digital sebagai dimensi ambiguitas *Hybrid Public Sphere* yang belum teridentifikasi dalam literatur, dan kesadaran politik performatif sebagai jalan tengah analitis melampaui dikotomi sempit "politik tulus versus pencitraan." Keterbatasan utama penelitian ini adalah penggunaan satu informan kunci pada satu konteks kota, sehingga penelitian lanjutan dengan desain multi-informan, komparatif, atau longitudinal di berbagai kota sangat disarankan untuk menguji generalisabilitas konsep-konsep yang diusulkan.

Berdasarkan temuan ini, beberapa saran dapat dikemukakan. Bagi pengelola kafe modern, disarankan untuk mempertimbangkan desain interior yang menyediakan gradasi privasi lebih variatif dan memastikan keandalan infrastruktur digital sebagai affordansi kunci bagi Gen Z. Bagi pemerintah dan organisasi pendidikan politik, kafe modern perlu diakui sebagai kanal aspirasi demokratis informal yang *legitimate*, dan program literasi digital perlu diperluas untuk mencakup literasi hibriditas, kemampuan mengelola kapan teknologi harus digunakan dan kapan harus ditinggalkan agar memperkuat, bukan melemahkan, kapasitas deliberatif. Bagi akademisi, agenda riset lanjutan yang mendesak mencakup eksplorasi efek paradoks validasi digital dari perspektif psikologi komunikasi, perbandingan sistematis kafe modern versus warkop tradisional sebagai arena deliberasi, serta studi longitudinal pergeseran tipologi ruang publik dalam siklus politik yang berbeda.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Awad, S. H. (2021). Urban dialogues: The lives and after-lives of political street art images. *City*, 25(3-4), 510-525. <https://doi.org/10.1080/13604813.2021.1943233>
- Azizah, K. (2023). Teori Public Sphere dalam Komunikasi Politik. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3461. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2649>
- Bennett, W. L., & Pfetsch, B. (2018). Rethinking Political Communication in a Time of Disrupted Public Spheres. *Journal of Communication*, 68(2), 243-253. <https://doi.org/10.1093/joc/jqx017>
- Eppler, M. J., & Mengis, J. (2004). The concept of information overload: A review of literature from organization science, accounting, marketing, MIS, and related disciplines. In *Information Society* (Vol. 20, Number 5, pp. 325-344). <https://doi.org/10.1080/01972240490507974>
- Faisal, A., & Hasyim, M. (2022). WARKOP (COFFEEHOUSE) AND THE CONSTRUCTION OF PUBLIC SPACE IN MAKASSAR CITY. *International Journal of Professional Business Review*, 7(5). <https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i5.706>
- Farnanda, Efendi, D., Taufik, A. A., & Sulaksono, T. (2018). Acehese coffee shops as public spaces: Aceh political participation model in Yogyakarta. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 6(3), 9-15. <https://doi.org/10.18510/hssr.2018.632>
- Foucault, M. (1995). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison Second Edition*.
- Hakim, M., & Amir, A. S. (2022). *The Function of a Coffee Shop as a Social Cultural Entity*. [www.intechopen.com](http://www.intechopen.com)
- Junaidi, J., Ardiya, A., & Anugrah, P. (2022). COFFEE SHOPS AS SPACE FOR THE CULTURAL PRODUCTION IN URBAN SOCIETY. *Wisdom*, 22(2), 50-58. <https://doi.org/10.24234/wisdom.v22i2.760>
- Landau-Donnelly, F., & Zebracki, M. (2023). The politics of restor(y)ing: towards a conflictual approach to art in urban public space. *City*, 27(5-6), 812-828. <https://doi.org/10.1080/13604813.2023.2255400>
- Luky, A., Amin, S., Ilmu, P., Sosial, P., Tarbiyah, I., & Keguruan, D. (2022). ANALISIS SELF-PRESENTING DALAM TEORI DRAMATURGI ERVING GOFFMAN PADA TAMPILAN INSTAGRAM MAHASISWA (Vol. 1, Number 2). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/dsjpips>
- Middleton, C., & Win, T. Z. M. (2021). The Emergence of a Hybrid Public Sphere in Myanmar: Implications for Democratisation. *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 9(1), 45-64. <https://doi.org/10.1017/trn.2021.2>

- ÖNÜRME, O., & TEMEL, F. (2022). Social Spaces and Agenda: A Review of Traditional and New Generation Coffeehouses. *İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS)*. <https://doi.org/10.54282/inijoss.1129165>
- Ridwan, M. (2018). *Penelitian - Penguatan Program Kelas Internasional*.
- Samnuzulsari, T., Edison, E., & Yudiatmaja, W. E. (2019). From Popular to Partisan Public Sphere: The Political Change of the Coffee Shops in Kepulauan Riau. *Komunitas*, 11(1), 119–128. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v11i1.17235>
- Suciati, H., & Nuqul, F. L. (2025). *The Role of Social Media in Building Women's Political Identity: Its Impact on Self-Efficacy and Political Participation*.
- Viartasiwi, N., & Trihartono, A. (2020). Café in small towns: A picture of the weakening social engagement. *Coffee Science*. <https://doi.org/10.25186/cs.v15i.1687>